

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Raharjo, Handri. 2016. *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Djunaedi, Karnasudirdja, H. Eddy. 2006. *Tanggung Jawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat dan Penerapannya oleh Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia*, Jakarta : PT. Tatanusa.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Ekon, Yanto M.P. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Nasional Indonesia*, Kupang : Penerbit CV. Kairos.
- Ekon, Yanto M.P. 2021. *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*. Kupang : Fakultas Hukum Unkris..
- Supramono, Gatot. 1991. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Djambatan
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Muladi, H. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Arief, Nawawi Barda. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Radja Grafindo.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

### **Jurnal**

Halili. Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Budaya Impunitas. *Jurnal Hukum*. Dosen Pendidikan Hak Asasi Manusia Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum FISE UNY.

Kusnadi Nandang. 2017. Prespektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Ozi Saputra, Surajiman 2021. Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia Studi Kasus Timor – Timur. *Journal Of Islamic And Law Studies*. Ilmu Hukum Universitas Nasional.

Saptohadi Satrio 2013. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat. *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Firmandiaz Viddy, 2020. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor – Timur) *Res Publica* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Abidin Zainal, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Regulasi, Penerapan Dan Perkembangannya.

Hikmawati Puteri, 2012. Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *AD HOC Jurnal Hukum*

### **Putusan Hakim**

Putusan Nomor : 04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 02/PID.HAM/AD.HOC/2004/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor : 06K/HAM.AD HOC/2005

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 34PK/PID.HAM.AD HOC/2007